



Pelaksanaan Kebijakan Legislasi terhadap Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Efektivitas Penyusunan Produk Legislatif

Ega Gunawan

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan kebijakan legislasi terhadap komunikasi politik antar anggota DPRD dalam mewujudkan efektivitas penyusunan produk legislatif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik survey. Lokasi penelitian adalah di DPRD Kabupaten Garut dengan jumlah responden sebanyak 50 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan legislasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komunikasi politik antar anggota DPRD dalam mewujudkan efektivitas penyusunan produk legislatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa untuk penyelenggaraan kebijakan legislasi secara baik dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi politik antar anggota DPRD sehingga terwujud efektivitas penyusunan produk legislatif.

Kata kunci: efektivitas, kebijakan, komunikasi politik, produk legislatif

1. Pendahuluan

Pembangunan di segala bidang terus dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan semata untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah serta DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah yang ada di bawahnya.

Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu: pertama: pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum, yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; kedua: pelayanan yang diberikan secara orang-perorangan, yang meliputi kemudahan-kemudahan dalam memperoleh kartu penduduk dan surat-surat lainnya, pembelian karcis perjalanan, dan lain sebagainya. Pelayanan publik merupakan tuntutan masyarakat agar kebutuhan mereka baik secara individu maupun sebagai kolektif terpenuhi (Agustino, 2016).

Pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat harus diatur dengan suatu regulasi yang mengikat semua masyarakat sehingga dalam usaha mencapai tujuan tersebut para *stake holders* (pemerintah, masyarakat dan unsur privat/ swasta) menyadari peran dan fungsinya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Regulasi yang dibuat harus mengacu pada kepentingan dan aspirasi masyarakat dimana kepentingan dan aspirasi tersebut harus dapat diangkat oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintah daerah.

DPRD Kabupaten Garut sebagai representasi seluruh rakyat Garut dituntut perannya untuk bekerja secara efektif dalam penyusunan produk legislatif. Dimana produk legislatif yang dihasilkan nantinya akan berguna untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Garut sehingga tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi misi Kabupaten Garut dapat terwujud.

Berdasarkan dugaan sementara berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan berbagai pihak, peneliti menduga bahwa efektivitas pembahasan produk legislatif dipengaruhi oleh komunikasi politik sebagai implikasi dari pelaksanaan kebijakan legislasi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan tema pengaruh pelaksanaan kebijakan legislasi terhadap komunikasi politik antar anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam mewujudkan efektivitas penyusunan produk legislatif di Kabupaten Garut.

2. Metodologi

Penelitian merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi dan/atau data secara sistematis untuk menambah pemahaman terhadap suatu fenomena tertentu (Ramdhani, 2013). Penelitian menggunakan metode ilmiah dengan cara pengumpulan data dan uji analisis dari hipotesis (Ramdhani & Ramdhani, 2016). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik survey untuk menggali hubungan antar variabel. Penelitian deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua fenomena atau lebih (Iskandar, 2016). Teknik survey yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dengan mengambil sejumlah sampel yang dianggap representatif untuk mewakili populasi dari fakta-fakta dan fenomena-fenomena variabel penelitian dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.

Untuk melihat kondisi objektif ada objek penelitian. Peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian, yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian penelitian yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1	Pelaksanaan Kebijakan Legislasi (X) (Agustino, 2016)	a. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap	1) Kesukaran-kesukaran teknis
			2) Keberagaman perilaku yang diatur
			3) Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
		b. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki	1) Jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki kebijakan
2) Ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki kebijakan			

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator			
		c. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat	1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai			
			2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan			
			3) Ketepatan alokasi sumber dana			
			4) Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana			
			5) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana			
			6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang			
			7) Akses formal pihak-pihak luar			
		d. Perihal di luar Undang-Undang	1) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi			
			2) Dukungan publik			
			3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat			
			4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana			
			2	Komunikasi Politik antar Anggota DPRD (Y) (Iskandar, 2016)	a. Komunikator politik	1) Mengirim Pesan yang jelas
						2) Memilih media yang cocok
						3) Meminta kejelasan tentang peran yang diterima
b. Pesan politik	1) Bahasa atau tulisan yang baik					
	2) Penyampaian yang baik dan jelas					
	3) Pernyataan dan laporan					
c. Saluran komunikasi politik	1) Audio					
	2) Visual					
	3) Audio visual					
d. Komunikasi politik	1) Berkonsentrasi pada pesan yang akan diterima					
	2) Memberikan umpan balik					
e. Umpan balik efek/ feed back politik	1) Penerimaan					
	2) Tindakan nyata					
3	Efektivitas Penyusunan Produk Legislasi (Iskandar, 2016)	a. Kebijakan dasar	1) Tujuan			
			2) Rencana			
		b. Kejelasan strategi kegiatan	1) Perumusan strategi			
			2) Pelaksanaan strategi			
			3) Evaluasi terhadap strategi			
		c. Pengorganisasian sumber daya organisasi yang Jelas	1) Sumber daya manusia			
			2) Teknologi informasi			

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator
			3) Sarana prasarana
		d. Dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan perencanaan disertai pengorganisasian dan pengawasan	1) Pengelompokkan kegiatan-kegiatan 2) Pendelegasian wewenang 3) Pengawasan (controlling)
		e. Hasilnya dapat mencapai tujuan dan mendatangkan keuntungan atau kepuasan masyarakat	1) Tercapainya efektivitas penyusunan produk legislatif 2) Kepuasan masyarakat

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi pelaksanaan kebijakan publik, dimana pelaksanaan kebijakan publik didefinisikan sebagai implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Untuk memperkuat hasil penelitian dilakukan verifikasi hasil penelitian dengan hasil observasi, wawancara, dan studi literatur sebagaimana yang direkomendasikan oleh (Ramdhani & Ramdhani, 2014), dan (Ramdhani, et al., 2014). Responden dalam penelitian ini berjumlah 50 orang, yang merupakan anggota DPRD periode 2014-2019 hasil Pemilihan Legislatif 2014.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif, ditemukan berbagai permasalahan pada variabel pelaksanaan kebijakan legislasi maka disarankan kepada DPRD Kab. Garut agar meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan dan merumuskan suatu ukuran yang baku untuk menilai kinerja anggota DPRD. Secara operasional langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

- a. Pada dimensi mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap indikator keberagaman perilaku yang diatur yaitu semakin beragam perilaku yang diatur, semakin besar pula kebebasan bertindak yang harus dikontrol para pejabat pelaksana, maka disarankan kepada DPRD untuk:
 - 1) Merumuskan, membuat, menerapkan, dan menegakkan sanksi yang tegas atas pelanggaran suatu kebijakan. Fenomena yang terjadi di masyarakat kita adalah adanya kecenderungan peraturan dibuat untuk dilanggar. Sejatinya, peraturan tersebut dibuat untuk ditaati sehingga ketertiban dan kenyamanan hidup bermasyarakat dapat terwujud.
 - 2) Perlakuan yang sama kepada semua masyarakat, jangan ada standar ganda, jangan karena kedekatan, atau adanya hubungan kekerabatan maka hukum menjadi tumpul (pelanggar hukum kebal hukum)
- b. Pada dimensi mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap indikator mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap maka disarankan kepada DPRD Kab. Garut untuk merumuskan dan membuat sistem penilaian dan sasaran kerja anggota DPRD yang indikator-indikator penilaiannya disesuaikan dengan program kerja tahunan DPRD sehingga dapat dilakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan atas target kerja yang tidak tercapai dan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada permasalahan komunikasi politik antar anggota DPRD, masih adanya anggota DPRD yang belum mengetahui dan meminta kejelasan perannya di DPRD, hasil komunikasi politik antar anggota DPRD sering disampaikan langsung pada pucuk pimpinan (tidak melalui saluran yang berjenjang/ hierarkis), dan komunikasi belum sepenuhnya mendapatkan makna tertentu dan menanggapi pesan yang disampaikan oleh komunikator sebagai umpan balik yang diharapkan dalam komunikasi politik maka disarankan agar para anggota DPRD meningkatkan kualitas komunikasi politik yang dilakukan dengan anggota DPRD lainnya. Secara operasional langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

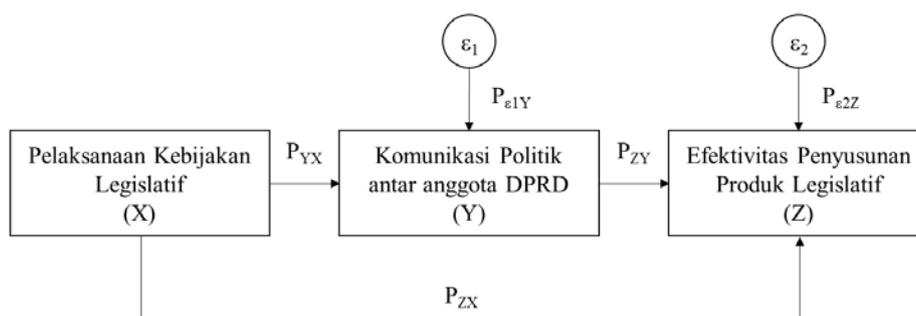
- a. Pada dimensi komunikator politik, indikator meminta kejelasan tentang peran yang diterima yaitu para anggota DPRD di Kab.Garut sudah meminta kejelasan peran yang diterimanya maka disarankan:
 - 1) Hendaknya ketua komisi DPRD membaca dan menelaah kembali tupoksi komisi yang dipimpinnya, kemudian membagi tugas tersebut kepada anggota komisinya berdasarkan keahlian, daerah pemilihan, dan latar belakang pendidikannya.
 - 2) Hendaknya para anggota DPRD sendiri jemput bola, lebih aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD, dan lebih inovatif dalam melaksanakan tugas sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- b. Pada dimensi pesan politik, indikator pernyataan dan laporan yaitu laporan tersebut bersifat hierarkis/ berjenjang, hendaknya setiap hasil komunikasi politik anggota DPRD dilaporkan secara berjenjang kepada wakil ketua komisi, wakil ketua komisi melaporkan kepada wakil ketua DPRD, dan wakil ketua DPRD melaporkan kepada ketua DPRD. Kalaupun ada hasil komunikasi politik yang bersifat *urgens* dan harus segera dilaporkan langsung kepada ketua DPRD, maka hendaknya setelah melapor kepada ketua DPRD hendaknya anggota DPRD tersebut melapor dan memberitahu kepada pimpinan secara berjenjang, dengan demikian pimpinan yang berada di bawah ketua DPRD tahu informasi dan kondisi yang berhubungan dengan pekerjaannya serta merasa dihargai, dan iklim organisasi serta tercipta suatu hubungan kerja, iklim organisasi, dan *human relations* yang kondusif dan menyenangkan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja anggota DPRD.
- c. Pada dimensi komunikasi politik indikator memberikan umpan balik yaitu dalam komunikasi politik tersebut terjadi umpan balik dimana komunikasi mendapatkan makna tertentu dari komunikator sehingga komunikasi menjawab/ menanggapi pesan yang disampaikan komunikator, hendaknya anggota DPRD Kab. Garut meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi, dan dalam berkomunikasi hendaknya komunikator memperhatikan situasi dan kondisi dimana komunikasi berlangsung (biasanya aspek yang bersifat fisik: iklim, cuaca, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu, dimana komunikator berada), komunikator menyampaikan pesan yang runtun dan tidak bertentangan dengan pesan yang disampaikan dengan pesan sebelumnya, sehingga komunikasi dapat menangkap makna yang terkandung dalam pesan tersebut dan memberikan umpan balik dengan memberikan tanggapan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator.
- d. Komunikasi politik dapat dilakukan melalui media komunikasi masa berbasis jaringan on-line. Portal komunikasi merupakan salah satu format penyampaian informasi yang efektif untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Pamoragung, et al., 2006; Ramdhani, et al., 2006; Aulawi, et al., 2017).

Permasalahan pada efektivitas penyusunan produk legislatif terkait Ketua DPRD belum mendelegasikan wewenangnya secara optimal kepada wakil ketua DPRD, masih adanya anggota DPRD yang ditempatkan pada komisi yang tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya, dan masih belum optimalnya kepuasan masyarakat atas kinerja anggota DPRD

maka disarankan kepada anggota DPRD untuk lebih mengoptimalkan penerapan fungsi-fungsi manajemen di DPRD. Secara operasional langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

- a. Pada dimensi kejelasan strategi kegiatan indikator perumusan strategi dimana dalam penyusunan produk legislatif, para anggota DPRD belum merumuskan tujuan jangka menengah dan jangka panjang secara optimal maka hendaknya strategi jangka menengah dan jangka panjang dalam penyusunan produk legislatif dituangkan secara lebih rinci dalam suatu buku pedoman yang dibuat khusus.
- b. Pada dimensi dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan perencanaan disertai pengorganisasian dan pengawasan indikator pendelegasian wewenang yaitu Ketua DPRD belum mendelegasikan wewenangnya secara optimal kepada wakil ketua DPRD maka disarankan:
 - 1) Ketua DPRD mendelegasikan wewenang dan memberikan kepercayaan yang lebih kepada wakil ketua DPRD agar pelaksanaan tugas menjadi lebih ringan. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, seorang pimpinan tidak selalu bisa melakukan semua tugasnya sendirian, dia perlu bantuan orang lain dan mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain yang dianggap kapabel, dalam hal ini wakil ketua DPRD.
 - 2) Wakil ketua DPRD hendaknya menunjukkan kapabilitasnya, sehingga Ketua DPRD tidak ragu-ragu untuk mendelegasikan wewenangnya kepada wakil ketua DPRD.
- c. Pada dimensi pengorganisasian sumber daya organisasi yang jelas indikator sumber daya manusia yaitu masih adanya anggota DPRD yang ditempatkan pada komisi yang tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya, maka hendaknya para anggota DPRD ditempatkan pada komisi yang sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya sehingga para anggota DPRD lebih menguasai bidang yang akan menjadi garapannya, dan tidak perlu waktu yang lama untuk dapat mempelajari dan memahami bidang yang akan menjadi garapannya sehingga efektivitas kerja dapat tercapai.
- d. Pada dimensi hasilnya dapat mencapai tujuan dan mendatangkan keuntungan indikator kepuasan masyarakat dan masih belum optimalnya kepuasan masyarakat atas kinerja anggota DPRD hendaknya para anggota DPRD terus meningkatkan kapasitasnya sebagai anggota DPRD. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota DPRD baik yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten/ Provinsi maupun DPR hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga para anggota DPRD memiliki kualitas dan kapasitas diri yang mumpuni yang pada akhirnya akan dapat membuat kebijakan yang berkualitas, berpihak pada rakyat, hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dengan demikian kepuasan masyarakat pun akan meningkat. Kepuasan dapat ditingkatkan melalui upaya pembenahan dan peningkatan hal-hal yang bersifat fisik (tangible), empati, responsibility, responsiveness, jaminan (assurance), dan berkesesuaian dengan peraturan (Ramdhani, et al., 2011).

Penelitian ini selanjutnya menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan legislatif.. Selanjutnya untuk mempermudah analisis, dilakukan pemodelan terhadap fokus penelitian dalam bentuk paradigma penelitian. Model adalah penyederhanaan dari dunia nyata yang dapat memperlihatkan relasi antar variabel (Amin & Ramdhani, 2006). Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Paradigma Penelitian

Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, yang dapat diwakili dalam bentuk tabel, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisa Statistika

Hipotesis Utama	Koefisien jalur	F _{hitung}	F _{tabel}	Determinan	Makna hubungan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Legislatif terhadap Komunikasi Politik antar anggota DPRD dalam Mewujudkan Efektivitas Penyusunan Produk Legislatif	0,8401	36,77	4,6	0,7057	Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien jalur	t _{hitung}	t _{tabel}	Determinan	Makna hubungan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Legislatif terhadap Komunikasi Politik antar anggota DPRD	0,7543	7,96	2,01	0,5660	Signifikan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Legislatif terhadap Efektivitas Penyusunan Produk Legislatif	0,5012	3,40	2,01	0,4005	Signifikan
Pengaruh Komunikasi Politik antar anggota DPRD dalam Mewujudkan Efektivitas Penyusunan Produk Legislatif	0,3949	2,68	2,01	0,3052	Signifikan

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengujian Hipotesis Utama

Besarnya pengaruh pelaksanaan kebijakan legislasi berpengaruh nyata terhadap komunikasi politik antar anggota DPRD dalam mewujudkan efektivitas penyusunan produk legislatif dilihat dari koefisien determinasi (R^2_{YZX}) sebesar 0,7057 sedangkan sisanya 29,43% dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak diteliti. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh total pelaksanaan kebijakan legislasi (X) terhadap komunikasi politik antar anggota DPRD (Y) dalam mewujudkan efektivitas penyusunan produk legislatif (Z) sebesar 0,7057. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa faktor kebijakan yang cermat dan jelas, kompleksitas masalah yang akan digarap, tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, variabel-variabel di luar Undang-Undang menentukan komunikasi politik antar anggota DPRD yang pada akhirnya akan berdampak pada efektivitas penyusunan produk legislatif.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penyusunan produk legislatif ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan legislasi namun juga dipengaruhi oleh komunikasi politik antar anggota DPRD. Dimana komunikasi politik dapat dilaksanakan jika pesan yang dikirim jelas, menggunakan bahasa dan tulisan yang baik, menggunakan saluran komunikasi yang tepat, sehingga terjadi umpan balik yang diharapkan. Dalam hal ini untuk melakukan komunikasi politik yang efektif, para anggota DPRD Kab. Garut menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi yang dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam penyampaian pesan. Pola komunikasi yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan pembentukan konsensus bersama, berdasarkan pendekatan *win-win solution* (Ramdhani & Suryadi, 2005)

Selain faktor pelaksanaan kebijakan dan komunikasi, variabel efektivitas penyusunan produk legislatif juga dipengaruhi faktor lain (*epsilon*). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh faktor lain yang tidak diteliti sebesar 29,43%. *Epsilon* yang diduga turut mempengaruhi efektivitas penyusunan produk legislatif adalah struktur organisasi badan legislatif, dan hubungan timbal balik antara legislatif dengan eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya sebagai unit-unit di tingkat daerah serta hubungan badan tersebut dengan lembaga-lembaga yang sama di tingkat yang lebih tinggi hierarkinya.

3.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Legislatif terhadap Komunikasi Politik antar anggota DPRD

Pelaksanaan kebijakan legislasi akan dapat berjalan dengan baik jika komunikasi politik antar anggota DPRD berjalan dengan baik. Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersaji pada Tabel 2, diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi variabel pelaksanaan kebijakan legislatif terhadap komunikasi politik antar anggota DPRD sebesar 56,60%, sedangkan sisanya sebesar 43,40% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel kinerja yang tidak dimasukkan ke dalam model (*epsilon*). Dari hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa para anggota DPRD sudah melakukan komunikasi politik dengan anggota DPRD lainnya baik melalui saluran komunikasi maupun bertemu langsung *face to face*, dan setelah dilakukan komunikasi politik maka anggota DPRD tersebut melaporkan hasil komunikasi politiknya kepada atasannya langsung sesuai garis hierarkis atau langsung kepada pucuk pimpinan, tetapi hasil penelitian menunjukkan variabel komunikasi bukanlah satu-satunya variabel yang menjamin dapat berjalannya pelaksanaan kebijakan.

Varibel lain (*epsilon*) yang diduga mempengaruhi komunikasi adalah kredibilitas, konteks, dan kesinambungan serta konsistensi. Kredibilitas (*credibility*) berkaitan dengan hubungan saling percaya antara komunikator dan komunikan. Komunikator perlu memiliki kredibilitas dimata komunikan, misalnya dalam hal tingkat keahliannya dalam bidang yang bersangkutan dengan pesan/ informasi yang disampaikan, sedangkan konteks (*context*) berkaitan dengan situasi dan kondisi dimana komunikasi berlangsung (Broom, et al., 2006). Konteks di sini terdiri dari aspek

yang bersifat fisik (iklim, cuaca); aspek psikologis; aspek sosial; dan aspek waktu. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, komunikator harus memperhatikan situasi dan kondisi dimana komunikasi berada, dan kesinambungan serta konsistensi (*continuity and consistency*) pesan/ informasi yang disampaikan diperlukan agar komunikasi berhasil dilakukan. Pesan perlu disampaikan secara terus menerus dan konsisten. Pesan yang disampaikan sebelumnya dengan pesan selanjutnya tidak saling bertentangan.

3.2.3 Pengujian Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Legislatif terhadap Efektivitas Penyusunan Produk Legislatif

Dari pengujian analisis jalur, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel pelaksanaan kebijakan legislasi terhadap variabel efektivitas penyusunan produk legislatif menunjukkan pengaruh sebesar 40,05% sedangkan sisanya 59,95% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel kebijakan yang tidak dimasukkan ke dalam model. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, rendahnya pengaruh variabel pelaksanaan kebijakan terhadap variabel efektivitas penyusunan produk legislatif tersebut terjadi dikarenakan walaupun kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Garut sudah memberikan petunjuk yang cermat dan jelas, kelompok sasaran diberlakukannya kebijakan sudah jelas, dan partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan cukup besar serta komunikasi telah dilaksanakan dengan baik, namun hal tersebut bukanlah faktor dominan yang berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan produk legislatif.

Berdasarkan penelitian, variabel lain (*epsilon*) yang diduga mempengaruhi efektivitas penyusunan produk legislatif adalah penguasaan anggota DPRD terhadap produk legislasi. Penguasaan anggota DPRD terhadap produk legislasi meliputi wawasan dan keterampilan, seperti yang disebutkan Warham (Iskandar, 2016) menyebutkan kemampuan bekerja seseorang itu berupa penguasaan wawasan pengetahuan yang luas dan keterampilan yang tinggi. Walaupun pengetahuan dan keterampilan merupakan atribut-atribut individu, namun sebenarnya pengetahuan dan keterampilan itu juga milik organisasi yang mempergunakannya atau dengan kata lain organisasi telah membeli hal itu dari anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional. Selanjutnya Eysenck (Iskandar, 2016) mengatakan seseorang yang memiliki segala hal yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan beberapa aktivitas tertentu dapat berpartisipasi dalam aktivitas tertentu, termasuk dalam kegiatan organisasi.

3.2.4 Pengujian Pengaruh Komunikasi Politik antar anggota DPRD dalam Mewujudkan Efektivitas Penyusunan Produk Legislatif

Dari hasil pengujian diketahui bahwa pengaruh komunikasi politik antar anggota DPRD terhadap efektivitas penyusunan produk legislatif sebesar 0,3052 atau sebesar 30,52%. Sedangkan sisanya 69,48% tidak dimasukkan ke dalam model. Rendahnya pengaruh ini menunjukkan bahwa efektivitas penyusunan produk legislatif tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh komunikasi politik antar anggota DPRD. Hasil pengujian ini sesuai dengan observasi di lapangan yang menunjukkan kondisi faktual bahwa meskipun anggota DPRD Kab.Garut telah melakukan komunikasi politik, namun ternyata hal tersebut belum cukup untuk menjamin terciptanya efektivitas penyusunan produk legislatif.

Berdasarkan pengamatan peneliti, variabel lain (*epsilon*) yang diduga mempengaruhi efektivitas penyusunan produk legislatif adalah: stimulasi eksternal, setting psikologis, dan komunikasi intra institusional. James Lee seperti yang dikutip Priyatmoko berpendapat bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi terhadap proses legislatif terbagi ke dalam tiga hal yaitu (1) Stimulasi eksternal, yang mencakup afiliasi partai politik, kepentingan pemilih, input-input eksekutif, dan aktivitas kelompok penekan; (2) Setting psikologis, yaitu predisposisi-predisposisi, sikap, peran-peran yang dijalankan para wakil rakyat, serta harapan-harapan mereka. Faktor-faktor ini cukup penting bukan saja karena kemungkinan efek independennya melainkan juga potensinya untuk menyaring dan mengubah pengaruh eksternal; dan (3) Komunikasi intra institusional, baik yang bersifat formal maupun informal, termasuk kemungkinan adanya hubungan-hubungan patronase di dalamnya (Randini & Wardani, 2013; Andriani, 2017).

4 Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan legislasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komunikasi politik antar anggota DPRD dalam mewujudkan efektivitas penyusunan produk legislatif. Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut, mengingat terdapat beberapa temuan penting pada penelitian serta keterbatasan dalam penelitian ini maka diharapkan pada masa yang akan datang berbagai pihak dapat meneliti lebih lanjut faktor lain dari variabel-variabel penelitian ini. Penelitian lanjutan lain yang disarankan diantaranya mengenai struktur organisasi badan legislatif, dan hubungan timbal balik antara legislatif dengan eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya sebagai unit-unit di tingkat daerah serta hubungan badan tersebut dengan lembaga-lembaga yang sama di tingkat yang lebih tinggi hierarkinya, kredibilitas, konteks, dan kesinambungan serta konsistensi dalam berkomunikasi, penguasaan anggota DPRD terhadap produk legislasi, stimulasi eksternal, setting psikologis, dan komunikasi intra institusional.

Daftar Pustaka

- Agustino, L., 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amin, A. S. & Ramdhani, M. A., 2006. Konfigurasi Model untuk Sistem Pendukung Keputusan. *Majalah Ilmiah Ekonomi Komputer*, 16(1), pp. 11-19.
- Andriani, S., 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Legislasi terhadap Manajemen Pembahasan Rancangan Produk Legislasi dalam Mewujudkan Produktivitas Penerbitan Peraturan Daerah*, Garut: Universitas Garut.
- Aulawi, H. et al., 2017. Functional Need Analysis of Knowledge Portal Design in Higher Education Institution. *International Journal of Soft Computing*, 12(2), pp. 132-141.
- Broom, G. M., Allen, H. C. & Cultrip, S. M., 2006. *Effective Public Relations*. s.l.:Pearson Prentice Hall.
- Iskandar, J., 2016. *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J., 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Pamoragung, A., Suryadi, K. & Ramdhani, M. A., 2006. *Enhancing the Implementation of e-Government in Indonesia Through the High-Quality of Virtual Community and Knowledge Portal*. Marburg, Academic Conferences Limited, pp. 341-347.
- Ramdhani, A. & Ramdhani, M. A., 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), pp. 1-12.

- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A. & Amin, A. S., 2014. Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), pp. 47-56.
- Ramdhani, M. A., 2013. *Metodologi Penelitian dalam Riset Teknologi Informasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramdhani, M. A. & Ramdhani, A., 2014. Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), pp. 11-19.
- Ramdhani, M. A. & Ramdhani, A., 2016. *Penelitian Pemasaran*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramdhani, M. A., Ramdhani, A. & Kurniati, D. M., 2011. The Influence of Service Quality toward Customer Satisfaction of Islamic Sharia Bank. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(9), pp. 1099-1104.
- Ramdhani, M. A. & Suryadi, K., 2005. *Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process*. Penang, Universiti Utara Malaysia, pp. 1-10.
- Ramdhani, M. A., Suryadi, K. & Susantosa, P., 2006. Telematic Policy Analysis in Developing Countries: A Case Study in Garut District-indonesia. *Journal of Applied Sciences Research*, 2(1), pp. 58-66.
- Randini, H. P. & Wardani, S. B. E., 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Kota Depok Periode 2009-2014 dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia .